Perkawinan *Bajapuik* dan Konsekwensinya dalam Keluarga Minang

Marriage Bajapuik And Consequences In The Minang's Family

Roswita Sitompul *

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Perkawinan adalah merupakan suatu cara dari manusia untuk mengembangkan keturunan oleh sebab itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat tertentu baik berdasarkan hukum positif, agama dan disamping itu ada hukum adat yang tak kalah pentingnya dalam proses setiap krisis rites dari kehidupan manusia, yang berbeda tapi selalu dipertahankan oleh masyarakat, penelitian ini adalah merupakan penelitian normatif yang bersumber pada data primer dan sekunder yakni buku, undang-undang, jurnal, hasil penelitian. Hasil penelitian bahwa kedudukan laki-laki dalam adat Minangkabau itu rendah dan secara fisik ia tidak mempunyai tempat di rumah ibunya dan tidak mempunyai hak apa pun sebagai bapak dalam rumah tangga, bahkan anak laki-laki tidak begitu mendapat perhatian, jika terjadi perceraian laki-laki yang keluar dari rumah, tidak berhak atas harta gonogini kecuali harta asal dan jika istri meninggal dunia kerabat suami harus segera menjemput duda itu untuk kembali ke kaumnya, jika terjadi konflik keluarga wanitalah yang memiliki hak bicara, kedudukan inilah yang menimbulkan watak wanita Minangkabau selalu angkuh dan mendominasi.

Kata Kunci : Perkawinan, Bajapuik, Konsekwensi, Keluarga

Abstract

Marriage is a way for people to develop offspring, therefore every marriage must meet certain requirements both based on positive law, religion and besides that there is a customary law that is not less important in the process of each crisis rites of human life, which is different but always maintained by community, this research is a normative research which sourced from primary and secondary data that is book, law, journal, research result. The result of the study that the position of men in Minangkabau adat is low and physically he has no place in his mother's house and does not have any rights as father in the household, even the boys are not paid attention, if there is divorce of men who come out of the house, on the property of the gonogini except the property of origin and if the wife dies the husband's relatives must immediately pick up the widower to return to his family, if there is a conflict of women's families who have the right to speak, this position that raises the character of Minangkabau women is always arrogant and dominating

Keywords: Marriage, Bajapuik, Konsekwensi, Family

How to Cite: Roswita Sitompul, (2017). Perkawinan *Bajapuik* dan Konsekwensinya dalam Keluarga Minang. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 5 (1): 9-14.

*Corresponding author:

E-mail: roswitasitompuluisu@gmail.com

p-ISSN: 2549 1660

e-ISSN: 2550-1305

PENDAHULUAN

Indonesia terdiri berbagai macam suku yang mempunyai adat yang berbeda satu sama lain. Hukum adat mengenal 3 macam sistem kekerabatan yakni a. Kekerabatan yang matrilineal yang menarik garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu b. Sistem kekerabatan yang Patrilineal yang menarik garis keturunan dari ayah atau bapak c. Garis keturunan yang Parental yang penarikan garis keturunan itu berdasarkan kedua belah pihak. Dengan adanya sistem kekerabatan ini menimbulkan akibat hukum yang berbeda satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Sistem kekerabatan ibu yang memberikan penilaian yang lebih super kepada anak perempuan dan anak perempuanlah sebagai ahli waris dan melanjutkan keturunan dalam keluarga. Meskipun sudah ada peraturan hukum positif yang bersifat universal yang mengatur tentang perkawinan yakni Undang-undang No 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga dan suami istri mempunyai kedudukan yang seimbang. Tapi hal ini sulit untuk diterapkan di masyarakat adat Pariaman, karena masih kentatnya ketentuan hukum adat itu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang datanya bersumber dari data primer dan sekunder yakni dari study pustaka, undang-undang, buku, hasil penelitian, jurnal, surat kabar harian, setelah data terkumpul dan dianalisis sehingga dapat dilihat bagaimana pengaruh dan realisasi dari perkawinan *bajapuik* itu dalam kehidupan bermasyarakat dan keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Minangkabau adalah menganut sistem matrilineal, masyarakat ini juga mempunyai keluarga inti yaitu

ayah, ibu, anak dan disamping itu mereka mempunyai keluarga kaum dan keluarga batih. Dalam keluarga kaum inilah terhimpun kekerabatan samando (seibu), saparuik (senenek) sajurai (satu keturunan) dan sekaum (satu kelompok keluarga), sesuku (satu suku). Jadi menurut adat Minangkabau seorang anak memakai suku ibunya dan yang berhak mewarisi harta serta pelanjut keturunan. Harta yang dimaksud disini adalah harta pusaka rendah yang merupakan hasil pencarian orang tuanya.

Dalam adat Minangkabau ibu memegang peranan yang sangat penting dalam keluarga, pendidid an juga merupakan suatu proses sosialisasi juga berada di tangan seorang ibu. Dalam kehidupan sehari-hari, yang berperan dalam pendidikan anak-anak dalam keluarga adalah ayah, ibu dan mamak. Tugas dan tanggungjawab mamak dalam bidang pendidikan dan ekonomi: a) Mamak bertanggungjawab membina pendidikan sosial kemanakannya terutama ahlak bergaul, berpakaian, berjalan, duduk. b) Mamak bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan formal dan agama serta membiayainya. c) Mamak bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan, rumah tangga kemanakannya yang telah dewasa, bagaimana berumah tangga yang baik dan bersikap sebagai seorang sumando.

Dalam kehidupan sosial budaya Minangkabau, maka a) Mamak bertanggung jawab mencari jodoh kemanakannya dan memilih mana yang terbaik untuk menjadi pasangan rumah tangganya, terutama perempuan, b) Mamak bertanggung jawab menyelenggarakan perkawinan baik fasilitas ataupun dana, c) Mamak bertanggung jawab membantu kehidupan rumah tangga dalam tahap permulaan perkawinan, d) Kemanakan menghormati mamak dalam situasi dan kondisi dimanapun berada (Alesyanti, 2013).

Perkawinan *bajapuik* adalah satu bentuk perkawinan yang terdapat di Minangkabau suku Pariaman, dimana

pihak wanita yang meminang pihak pria. Dalam bentuk perkawinan ini terdapat suatu kontradiksi antara hukum adat dan hukum agama yakni pria mempunyai kewajiban memberikan mahar pada calon mempelai istri hal ini merupakan suatu persyaratan yang didasarkan pada hukum Islam sedangkan calon mempelai istri mempunyai kewajiban memberikan uang *bajapuik* kepada calon *marapulai* sebagai sesuatu yang harus di wajipkan menurut ketentuan hukum adat (Roswita, 2005).

Adat perkawinan terdiri dari *bakampuang-kampuangan*, *alekrandom*, *malam bainai*, *badantam*, *bainduak bako*, *manjapuik marapulai*, *akad nikah bersandiang di rumah anak daro dan manjalang mintuo*.

Jika ada persesuaian perhubungan antara calon pengantin laki-laki dengan wanita baru keluarga wanita datang bertandang pada keluarga calon pengantin pria (*marantak tango*) yang artinya menginjak tangga. Hal ini merupakan awal pengenalan dari kedua calon jika ada persesuaian, baru ditingkatkan pembicaraan kedua belah pihak untuk berunding disebut dengan *mamendekkan hetongan*, keluarga perempuan akan datang pada keluarga lelaki. Sebelum proses memendekan *hetongan* ini berlanjut maka orang tua *anak daro* harus memberi taukan maksud baik mereka ini kepada paman *anak daro* dari pihak ibu yang paling tua.

Pada saat inilah pamannya bertanya pada *anak daro* apakah sudah siap untuk menikah karena segala sesuatu yang penting untuk kelangsungan acara itu akan di persiapkan oleh pengantin wanita yang salah satunya adalah uang *bajapuik*. Pada saat ini diadakan perundingan antara *ninik mamak* untuk memestakan kedua pengantin, akan tetapi orang tua pengantin wanita tidak sanggup untuk memestakan perkawinan anaknya, keluarga mempertimbangkan menjual harta pusako untuk membiayai pernikahan, jika tidak maka *ninik mamak* dari pihak pengantin wanita yang akan bertanggungjawab.

Pada saat acara memendekkan *hetongan* itu di bicarakan kedua belah pihak berapa besarnya uang *bajapuik* dan biaya-biaya lainnya. Uang *bajapuik* yang akan diminta pada keluarga perempuan itu ditentukan oleh kedua orang tua dan *sdr kandung*, setelah ada kata sepakat berapa uang *bajapuik* ini akan diminta baru ditingkatkan menjadi pembicaraan pada keluarga kecil maka di tingkatkan lagi pada keluarga besar yang melibatkan *mamak*, jumlah ini bisa aja berubah jika ada masukan dari *mamak*. Saat sekarang ini yang menentukan uang *bajapuik* itu adalah kedua orang tua *marapulai*, *mamak* hanya menerima khabar saja karena sudah banyak *mamak* yang merantau karena desakan hidup. Setelah ada pemberi tauhan pihak *marapulai* dan meminta pihak perempuan datang disertai dengan *mamak* dari masing2 calon mempelai, pada saat inilah mungkin dilakukan tawar menawar jika permintaan itu tidak sesuai dengan kesanggupan dari pihak wanita. Besarnya jumlah uang *bajapuik* itu tergantung pada status sosial dari *marapulai* yang akan dijadikan menantu.

Pada saat sekarang ini uang *bajapuik* itu diberikan sesuai dengan status dari *marapulai*, sudah barang tentu cukup mahal jika *marapulai* berstatus seorang sarjana, hal ini menimbulkan kegelisahan dari masyarakat Pariaman sehingga *anak daro* Pariaman sering kawin dengan orang luar dan keluarga anak perempuan banyak yang menggadaikan sawahnya untuk memenuhi uang *bajapuik* yang tinggi.

Akibatnya di Pariaman banyak anak perempuan yang tidak mendapatkan pasangan, ini disebabkan oleh karena adanya keharusan dari uang *bajapuik* (uang *hangus*). Akan timbul kecendrungan pertukaran sosial yang mengakibatkan pengaruh kekayaan matriil dan immatriil (Good Man, 2004). Jika ada persesuaian Acara dilakukan *batimbang tando*.

Pada acara ini keluarga wanita mendatangi keluarga pria dengan membawa segala sesuatu yang telah dibicarakan terdahulu. Calon mempelai

pria dan wanita saling memberi tanda bahwa mereka berjanji akan melakukan pernikahan.

Hasil wawancara dari ibu Sap pada tanggal 3 Mei 2017 mengatakan, pada saat sekarang ini tanda pengingat janji itu dilakukan dengan tukar cincin yang dilakukan dari keluarga kedua belah pihak. Jika salah satu dari kedua belah pihak itu ingkar janji maka pihak yang ingkar harus membayar dua kali lipat dari semua biaya yang dikeluarkan oleh keluarga wanita tapi sekarang dengan adanya kemajuan jaman tuntutan itu tidak dilaksanakan lagi dan segala pengeluaran cukup di iklaskan saja bagi pihak yang bersangkutan. Jika seorang pria Pariaman hendak bertunangan dengan wanita lain suku misalnya orang Jawa maka pihak pengantin pria itu yang menyiapkan segala sesuatu yang penting dalam acara pertunangan itu. Uang *bajapuik* ditentukan sebelum perkawinan dan diberikan pada saat pihak *marapulai* itu di jemput oleh pihak pengantin wanita

Para pihak yang terlibat dalam adat perkawinan itu ada 2 yaitu a) Pihak *marapulai* (calon pengantin laki-laki) yang terdiri dari *mamak marapulai* (paman dari pihak ibu) ayah *marapulai* dan b) ibu dari *marapulai* sedang dari pihak *anak daro* (calon pengantin wanita) terdiri dari a. *mamak anak daro* (paman dari pihak ibu), b. *Ayah dari anak daro*, c. Saudara laki-laki *anak daro* dan seorang perantara yang mengerti adat istiadat minang yaitu *kepala mudo*.

Menurut wawancara Pak Dodi tgl 13 Mei 2017, pada saat itu hanya *kepala mudo marapulai* saja yang saling berbicara dengan menggunakan *pepatah petitih* yang maksud dan tujuannya untuk menyampaikan rencana dari kedua pihak keluarga. Uang *bajapuik* itu diserahkan pada saat *majampuk marapulai*. Uang *bajapuik* itu ada 2 bahagian yaitu: a) Ada uang hangus yang diberikan pada keluarga *marapulai*, b) Ada juga uang *bajapuik* itu, yang diserahkan pada *marapulai*

Ada. tidak ada kewajiban dari pihak *marapulai* untuk mengembalikan uang

bajapuik itu berupa barang-barang pada saat pengantin datang ke rumah *mertua anak daro*. Ada. pihak keluarga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang *bajapuik* itu kepada *anak daro* berupa barang atau cincin, kalung emas dan pakaian wanita atau tempat tidur, pada saat *anak daro* itu mengantarkan makanan adat kerumah *mertua anak daro*.

Pada saat dilakukan pesta perkawinan maka pengantin pria di jemput oleh pihak keluarga *anak daro*, hasil wawancara Pak Dodi tgl 13 Mei 2017 yang menjemput *marapulai* itu adalah sdr terdekat *anak daro* akan tetapi kedua orang tua pengantin tidak ikut, pada saat itulah uang *bajapuik* itu diserahkan pada keluarga *marapulai*.

Setelah pesta selesai maka keluarga *marapulai* pulang seluruhnya maka tinggalah *marapulai* dengan beberapa temannya, kira-kira jam 5 sore *marapulai* pulang ke rumah orang tuanya dengan bersama teman-teman yang mengawalinya. Pada saat itu juga jam 9 malam pihak keluarga pengantin wanita datang mengunjungi *marapulai* bersama *anak daro*, setelah selesai mereka makan bersama, baru rombongan *marapulai* pulang ke rumah *anak daro* kembali inilah yang disebut dengan *manjalang 1* (satu).

Biasanya di Pariaman sekitar jam sebelas malam setelah selesai pesta perkawinan maka *marapulai* datang kembali kerumah *anak daro* dengan dikawal oleh empat orang teman atau tetangga *marapulai* dan di sini *marapulai* tidur dirumah *anak daro*, pagi-pagi benar sekitar jam 5 pagi sebelum para tetangga belum terjaga dari tidurnya maka *marapulai* sudah harus pulang dari rumah *anak daro*.

Menurut adat Pariaman esok harinya keluarga *anak daro* sudah memasak makanan yang lezat untuk dibawa kedua pengantin ke keluarga *mertua anak daro* yang isinya berupa juadah dan sembahreh berupa masakan rendang, ayam sangkang, ikan tongkol yang diasam padeh tapi tidak di potong-potong, kue bolu, pisang, lepat, bawaan dari *anak daro* ini dapat ditandai

jika ia mempunyai keluarga yang banyak maka akan banyak jumlah dari makanan yang di bawa dan jika orangnya punya kemampuan maka jenisnya cukup banyak. Sesampainya di rumah *marapulai* diadakan makan bersama yang telah disiapkan oleh keluarga mertua *anak daro* atau kalau jika keadaan ekonomi tidak memungkinkan bisa saja dilakukan dengan memakan makanan ringan berupa kue-kue saja, inilah yang disebut dengan *manjalang* kedua.

Keesokan harinya biasanya kedua pengantin bersama keluarga pergi mengunjungi abang atau adik dari mertua *anak daro* dengan membawa makanan yang ditaro di rantang dan mereka tidak makan disetiap keluarga yang didatangi pengantin.

Upacara pernikahan telah selesai maka *marapulai* tinggal di rumah istrinya, meskipun demikian ia bukanlah sebagai kepala keluarga di rumah sang istri, suami hanya berkedudukan sebagai semenda (*urang sumando*) sehingga ia memiliki *duo local residence* karena masing-masing pihak suami maupun istri masih di dalam kaum dan sukunya masing-masing. Jadi pernikahan itu bukanlah mengakibatkan salah satu pihak masuk dalam suku atau marga pasangannya seperti pada suku Batak, jika terjadi perkawinan maka istri pindah dan masuk dalam klein suami.

Hal ini terbukti setelah anak dara melaksanakan kewajibannya menghantar nasi berupa makanan adat yang akan diantar pada mertuanya maka *marapulai* masih tetap berdiam di rumahnya sampai pada saat rombongan anak dara menjemput *marapulai* untuk tinggal di rumah *anak daro*.

Dulu setelah diadakan pernikahan *marapulai* sering beberapa kali dijemput oleh keluarga sang istri untuk bermalam di rumah istrinya baru setelah subuh ia kembali kerumahnya, ini memberikan makna bahwa *marapulai* tidak boleh melupakan begitu saja rumah asal atau rumah kaum, sukunya. Ia hanya merupakan tamu atau *urang sumando* yang dihormati dikeluarga istri bagi

manatiang air di dulang. Tapi jika status sosial dari *marapulai* sangat kuat maka ia tidak akan diperlakukan semena-mena, meskipun demikian ia harus was-was menempatkan dirinya di kerabat sang istri.

Pernikahan bagi kaum pria di Minangkabau adalah merupakan langkah awal dia akan meninggalkan kampung halaman ibu, bapak dan saudara-saudaranya. Sehingga prosesi turun *janjang* dari rumah orang tuanya merupakan peristiwa yang sangat mengharukan. Acara turun *janjang* yang selalu dilakukan dalam *manjapuik marapulai* yang disaksikan oleh handai tolan.

Perkawinan adat Minang semua laki-laki dihantar ke rumah istrinya dan dijemput oleh keluarga istrinya secara adat dan diantar pula secara bersama-sama keluarga pihak laki-laki. Ini berarti *marapulai* sudah menetap di rumah dan di kampung halaman istri. Akibat dari perkawinan *bajapuik* ini jika terjadi perceraian maka suamilah yang pergi dari rumah istrinya sedang istri tetap tinggal ditempat kediamannya bersama anak-anaknya sesuai dengan ketentuan hukum adat.

Jika kemudian hari istri duluan meninggal dari suaminya, maka keluarga suami mempunyai kewajiban untuk menjemput suami yang telah menjadi duda untuk dibawa ke dalam lingkungan sukunya atau ke kampung halamannya. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat mengharukan dalam perkawinan adat Minang Pariaman. Di Minangkabau yang memiliki rumah itu hanyalah wanita dan pria hanyalah dianggap sebagai penumpang saja, jadi tempat perlindungan dari kaum pria adalah *surau*.

Inilah yang merupakan suatu alasan bagi kaum pria Minang tangguh dan gigih berjuang merantau. Dulu rumah *gadang* hanya dihuni oleh kaum wanita dan suami dan anak-anak terutama yang wanita. Anak laki-laki dalam usia sekolah dulu harus sudah mengaji di surau dan para pria itu sudah mulai bergaul dengan segala

tingkat usia yang membuat pria Minangkabau secara keras dan jantan.

SIMPULAN

Seorang suami dalam satu keluarga harus mengikuti ketentuan adat yang berlaku dalam keluarga istrinya sebagai seorang *sumando*, ia harus tunduk pada perintah *mamak*, suami diibaratkan *Abu di ateh tunggua* (abu di atas tungku) artinya ia harus dapat bertahan di atas rumah jika angin tidak kencang. Wanita Minangkabau dianggap sebagai tonggak rumah, lebih banyak mendominasi jalannya rumah tangga, jika terjadi permasalahan dalam keluarga maka ibu mempunyai hak dominan untuk menyelesaikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alesyanti. (2003), *Revitalisasi Nilai Moral Sosial Adat Minangkabau dan Kehidupan Keluarga*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Boestami. (1993), *Kedudukan dan Peranan Wanita Dalam Kebudayaan Suku Bangsa Minangkabau*
- Berutu, Lister. (2000), *Kedudukan dan Peranan Wanita Dalam Kebudayaan Suku Bangsa Minangkabau*.
- Sitompul, Roswita. (2005), *Hukum Adat, Bangsa Press, Jakarta*